

**TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERKONTRAK PARA PIHAK
BERDASARKAN AZAS *PRIVITY OF CONTRACT* DALAM HUBUNGAN
HUKUM YANG TERIKAT SYARAT DAN KETENTUAN BAKU DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

Nama : Kevin Christian

NRP : 1487004

ABSTRAK

Perkembangan dalam dunia bisnis yang pesat menimbulkan berbagai macam cara dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar bisnis yang dijalankan pelaku usaha dapat memberikan keuntungan yang besar. Salah satu permasalahannya adalah pencantuman klausula baku. Dalam praktiknya, terjadi suatu kesepakatan yang dibuat dimana pelaku usaha sudah menyiapkan klausula baku dalam perjanjian. Dalam hal ini, konsumen mengikatkan diri pada klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha. Kesepakatan yang dilakukan oleh konsumen memiliki implikasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara serta dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1340 KUHPerdara mengenai azas *Privity of Contract*, Pasal 1338 KUHPerdara mengenai azas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian. Permasalahan hukum yang timbul pada saat konsumen melakukan wanprestasi atau dirasa adanya ketimpangan dalam pelaksanaan perjanjian sehingga kesepakatan tersebut dapat digugat dengan mendalilkan kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini bersifat Yuridis Normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan pendekatan konseptual (berdasarkan doktrin-doktrin yang khusus dalam bidang hukum konsumen dan hukum perdata). Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya permasalahan penerapan hukum dari azas kebebasan berkontrak dikaitkan dengan azas *privity of contract*, permasalahan dalam syarat dan ketentuan baku dalam Pasal 18 yang dapat memberikan suatu kebatalan hukum dan mengenai substansi kontrak yang disepakati dan telah terikat dengan azas *privity of contract* ditinjau dari Pasal 1340 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diterbitkan untuk memberikan perlindungan hukum agar konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi tawar mendapatkan hak-haknya secara normatif. Keterkaitan dengan kesepakatan dan keterikatan dalam kontrak sebagaimana telah di bahas di atas harus dapat memberikan kepastian, ketertiban dan manfaat bagi setiap orang.

Kata Kunci : Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**JUDICIAL REVIEW OF FREEDOM OF LIABILITY OF PARTIES UNDER THE
PRIVITAL OF CONTRACT PRINCIPLES IN THE LEGAL RELATIONSHIP
BASED ON THE TERMS AND CONDITIONS OF RAW MARKETED WITH LAW
NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING PROTECTION OF CONSUMERS AND THE
BOOK OF THE PERIOD LAW**

Nama : Kevin Christian

NRP : 1487004

ABSTRACT

The fast Developments in business world raises a variety of ways and actions taken by business actors so that business executed business actors can provide great benefits. One of the problems is the inclusion of a standard clause. In practice, there is an agreement made where the business actor has prepared a standard clause in the agreement. In this case, consumers bind themselves to the standard clauses made by business actors. Agreement by consumer has implication as stipulated in the Civil Code and is associated with Article 18 of Law Number 8 Year 1999 concerning Protection of Consumers, Article 1340 Civil Code regarding the principle of Privity of Contract, Article 1338 of the Civil Code regarding the principle of freedom of contract and Article 1320 of the Civil Code of Terms the terms of the validity of the agreement. Legal issues arising when the consumer is making a default or perceived inequality in the execution of the agreement so that the agreement can be sued by arguing to the provisions of Article 18 concerning Protection of Consumers.

This thesis write by using descriptive analytical methodology. Descriptive analytical is a method that aims to describe to a research object that is studied through the data that has been collected and make conclusions generally accepted. This method is Normative Juridical. Normative juridical is approach based on the main legal material by reviewing the theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials such as the Constitution of 1945, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Book of Civil Law This study uses the approach legislation and conceptual approach (based on doctrines specific to consumer law and civil law). The results of the research that the authors do show the problem of application of the law of the principle of freedom of contract is associated with the principle of privity of contract, the problem in the terms and standard provisions in Article 18 which can provide a legal irritation and the substance of the contract agreed and has been bound by the principle of privity of contract reviewed from article 1340 of the Civil Code and Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection.

The Consumer Protection Act is issued to provide legal protection for consumers as a party to a bargaining position to obtain its rights normatively. The relationship with the agreement and the contractual attachment as discussed above should be able to provide certainty, order and benefit for everyone.

Keywords : Consumer Protection, Code Civil of Law

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan pembimbing	ii
Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iii
Persetujuan Revisi	iv
Pernyataan Publikasi Laporan Penelitian	v
Abstrak	vi
Kata pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	11
3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	12
1. Teoritis	13
2. Praktis	13
5. Kerangka Pemikiran	13
6. Metode Penelitian	16
1. Sifat Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Tersier	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Sistematika Penulisan	19
 BAB II TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SERTA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS <i>PRIVITY OF</i> CONTRACT DALAM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA	 21
A. Perjanjian Secara Umum	21

1. Pengertian Perjanjian Secara Umum	21
2. Perjanjian sebagai sumber dari perikatan dan hubungan antara perikatan dan perjanjian	24
3. Syarat-syarat Keabsahan Perjanjian	27
4. Akibat dari Perjanjian	29
5. Konsekuensi Dari Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian	30
B. Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian di Indonesia	35
C. Kebebasan Berkontrak di Indonesia	40
1. Latar Belakang Kebebasan Berkontrak	40
2. Pengaturan Azas Kebebasan Berkontrak	42
3. Pembatasan Azas Kebebasan Berkontrak	45
D. Azas <i>Privity Of Contract</i>	47
BAB III HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN BAKU DAN KETERIKATAN KONTRAK PARA PIHAK	52
A. Perjanjian Baku Sebagai Bentuk Perikatan Dari Para Pihak	52
1. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Baku di Indonesia	52
2. Asas Yang Mengatur Perjanjian Baku	55
B. Perjanjian Baku Dalam Praktik di Masyarakat	57
1. Urgensi Perjanjian Baku Dalam Kehidupan Bermasyarakat	57
2. Syarat Eksonerasi Dalam Perjanjian	60
3. Macam-Macam Perjanjian Baku Pada Umumnya Yang Digunakan Dalam Masyarakat	63
C. Keterikatan Para Pihak Dalam Perjanjian Baku yang Disepakati Bersama	65
1. Adagium <i>Take it or Leave it</i> Dalam Perjanjian Baku	65
2. Kesepakatan Yang Dapat Mengikat Para Pihak Dalam Perjanjian Baku	68

3. Keabsahan Perjanjian Baku	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	75
A. Kekuatan Hukum Dari Azas Kebebasan Berkontrak Terhadap Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati Oleh Para Pihak Dan Keterkaitan Terhadap Azas Privity of Contract	75
1. Penerapan Hukum Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian	75
2. Keterkaitan Azas Kebebasan Berkontrak dengan azas <i>Privity Of Contract</i>	79
B. Pemberlakuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Dalam Perjanjian Diantara Para Pihak	81
1. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sebagai Batasan Bagi Pelaku Usaha	81
2. Upaya Pihak Debitur Terhadap Keterikatan Kontraktual Dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen	88
C. Azas Kebebasan Berkontrak dan azas Kepribadian Dalam Keterikatan Kontraktual Perjanjian Baku	95
1. Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku	95
2. Azas <i>Privity of Contract</i> Dalam Perjanjian Baku	100
BAB V PENUTUP	104
1. Kesimpulan	104
2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
CURRICULUM VITAE	112